

20
21



JURNAL AHLI MUDA
INDONESIA

ISSN (p) : 2722-4414
ISSN (e) : 2722-4406

Vol. 2 No. 1

AKN PUTRA SANG FAJAR
BLITAR

JURNAL AHLI MUDA
INDONESIA

Jurnal hasil penelitian terapan yang di
diterbitkan oleh Akademi Komunitas Negeri
Putra Sang Fajar Blitar



Jl. dr. Sutomo No. 29 Kota Blitar
Telp./Fax : (0342) 0342-814644
E-Mail : jami@akb.ac.id

Title: Profil Usaha Peternakan Sapi Potong Rakyat Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur	1-12
Authors: Amam, Pradiptya Ayu Harsita	
<hr/>	
Title: Analisa Potensi Pasar Terhadap Produk Olahan Telur Ditinjau Dari Aspek Permintaan Pasar	13-20
Authors: Adiguna Sasama Wahyu Utama, Shanti Ike Wardani, Rani Arifah Normawati	
<hr/>	
Title: Pembangunan Peternakan Berkelanjutan dalam Perspektif Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Sarjana Peternakan Di Indonesia	21-36
Authors: Hidayat Bambang Setyawan, Amam	
<hr/>	
Title: Penggunaan Google Classroom dalam Diskusi Online	37-44
Authors: Joko Prayudha S	
<hr/>	
Title: Analisis Bauran Pemasaran Kopi Mandailing (Studi Kasus Pada Coffee Shop Lopo Mandheling Cafe, Panyabungan)	45-56
Authors: Novebri, Nurul Fadhilah	
<hr/>	
Title: Teknologi IB Pada Ayam Hutan Hijau Jantan Dengan Ayam Kampung Betina dalam Upaya Pelestarian Plasma Nuftah Ayam Bekisar	57-61
Authors: Sapta Andaruisworo, Erna Yuniati	
<hr/>	
Title: Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Sumedang	62-72
Authors: Sukmayadi, Erpi Rahman	
<hr/>	
Title: Sistem Informasi Plagiarisme Proposal Tugas Akhir Menggunakan Algoritma Rabin-Karp (Studi Kasus Fastikom Unsiq)	73-82
Authors: Muhamad Fuat Asnawi, Zaenal Abidin	
<hr/>	
Title: Pengaruh Penerapan E-Filling dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan pada Karyawan PT.Hadji Kalla	83-91
Authors: Ayu Puspitasari	
<hr/>	
Title: Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di UPT. P2SKP Pasongsongan	93-104
Authors: Sofiatul Marwah, Yaqub Cikusin, Hayat	

PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI UPT. P2SKP PASONGSONG

Sofiatul Marwah¹, Yaqub Cikusin², Hayat³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang. Jl. Mayjen Haryono 193 Malang 651444
e-mail : humas@unisma.ac.id

Penulis Korespondensi. Sofiatul Marwah, Program
Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu
Administrasi, Universitas Islam Malang. Jl. Mayjen
Haryono 193 Malang 651444 ,
e-mail : marwahs309@gmail.com

ARTIKEL INFO

Artikel History:

Menerima 15 April 2021
Revisi 8 Mei 2021
Diterima 27 Mei 2021
Tersedia Online 30 Juni 2021

Kata kunci :

Pengelolaan, Pelabuhan
Perikanan, Pendapatan Asli
Daerah

ABSTRAK

Objektif. Indonesia merupakan negara kepulauan, adanya pelabuhan perikanan sangat penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir serta dapat membantu perekonomian masyarakat yang bermata pencarian sebagai nelayan. Pelabuhan perikanan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan serta sekitarnya dengan batas-batas tertentu. Pelabuhan perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 KEPMEN No.34 tahun 2004 yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitas produksi, penanganan dan pengelolaan, fasilitas pengendalian pengawasan mutu, pemasaran hasil perikanan di wilayahnya, fasilitas dan melakukan pembinaan masyarakat nelayan. UPT.Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan merupakan pelabuhan perikanan yang cukup potensial dengan lokasi yang sangat strategis yang merupakan sentra perekonomian di Pulau Madura. Mengingat pentingnya peran pelabuhan perikanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sektor kelautan dan perikanan maka penting untuk di laksanakan penelitian.

Material and Metode. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Lokasi penelitian ini yaitu di UPT.Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan (UPT.P2SKP).

Hasil. Peran pemerintah dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di UPT.P2SKP Pasongsongan yang pertama dari hasil pengelolaan retribusi pendapatan pelabuhan perikanan melihat peraturan daerah seperti pembuatan surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin kapal pengangkutan ikan (SIKPI), usaha penangkapan dan pengangkutan ikan (SIUP), dan dari hasil retribusi pas masuk pelabuhan. Hasil retribusi pas masuk pelabuhan tidak hanya pemungutan masuk pelabuhan akan tetapi dari pemungutan pemakaian los jaring, pemakaian air, docking kapal, listrik, sewa lahan lerep, jasa kebersihan. Yang kedua operasional pelabuhan perikanan yang meliputi pendaratan ikan yang berlangsung dari pagi hingga tanpa batas waktu yang ditentukan serta membutuhkan beberapa orang dalam prosesnya, serta pelayanan perbekalan sebelum berangkat melaut yang berupa es, air, solar, dan bahan makananan. Yang ketiga yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti lahan pelabuhan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek, break

water, gedung TPI, kantor administrasi, tangki air, direksiket, gedung pengepakan ikan, bengkel, los jaring, docking kapal, poskamladu, rumah dinas, gedung serbaguna, kios ikan, kios nelayan. Dalam pengelolaan pelabuhan perikanan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di UPT.P2SKP Pasongsongan yaitu sumberdaya yang cukup memadai, struktur birokrasi yang berjalan dengan lancar, komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat nelayan sudah baik, aturan atau regulasi yang jelas juga berjalan dengan baik dan maksimal. Adapaun faktor penghambat dalam pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu kurangnya efektifitas pelayanan dalam pembuatan surat kapal dikarenakan waktu pembuatannya yang membutuhkan waktu cukup lama, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan surat kapal betapa pentingnya memiliki surat kapal dan surat tersebut sangat berguna ketika melakukakn kegiatan melaut, yang terakhir yaitu terbatasnya lahan dan beberapa gedung yang tidak dipergunakan.

Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan pelabuhan perikanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di UPT.P2SKP Pasongsongan pemerintah memiliki peran penting yaitu dalam pengelolaan pelabuhan perikanan seperti retribusi hasil pendapatan, operasional pelabuhan, tersedianya sarana dan prasarana. Ada 2 faktor yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

ARTICLE INFO

Artikel History:

Recived 15 April 2021

Revision 8 Mei 2021

Accepted 27 Mei 2021

Availible Online 30 Juni 2021

Keywords :

Management, Fishery Ports,
Local Own Revenue

A B S T R A C T

Objective Indonesia is an archipelagic country, the existence of a fishing port is very important for people living in coastal areas and can help the economy of people whose eyes are as fishermen. A fishing port is a place consisting of land and waters and its surroundings with certain boundaries. Fishery port as referred to in articles 3 and 4 of KEPMEN No.34 of 2004 which has the task of implementing production, handling and management facilities, quality control facilities, marketing of fishery products in its area, facilities and conducting guidance for fishing communities. UPT.P2SKP Pasongsongan is a fishery port that is quite potential with a strategic location, because it is located on the main route of Pantura Madura which connects Sumenep Regency with Pamekasan Regency which is the economic center on Madura Island.

Given the important role of fishing ports to increase local revenue in the marine and fisheries sector, it is important to carry out research.

Materials and Methods. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques, namely observation, interviews, documentation. The location of this research is UPT. Port and Management of Marine and Fishery Resources Pasongsongan (UPT.P2SKP).

Results. The role of the government in managing fishing ports in increasing local revenue at UPT.P2SKP Pasongsongan, the first from the management of fishing port revenue retribution, sees local regulations such as making fishing permits (SIPI), fishing vessel permits (SIKPI), fishing businesses and fish transportation (SIUP), and from the retribution for entering the port. The results of the port entry fees are not only the collection of port entrance fees, but also from the use of net booths, water usage, ship docking, electricity, flat land leases, cleaning services. The second is fishery port operations which include fish landing which takes place from morning to no specified time limit and requires several people in the process, as well as provision of supplies before going to sea in the form of ice, water, diesel, and foodstuffs. The

third is the availability of adequate facilities and infrastructure such as port land, docks, port ponds, complex roads, breakwater, fish auction, buildings, administrative offices, water tanks, directors, fish packing buildings, workshops, net booths, ship docking, poskamladu, houses. service, multipurpose building, fish kiosk, fisherman kiosk. In the management of fishing ports, namely driving factors and inhibiting factors. The driving factors in the management of the fishery port at UPT.P2SKP Pasongsongan are adequate resources, the bureaucratic structure is running smoothly, communication between governments and fishing communities is good, clear rules or regulations are also running well and optimally. As for the inhibiting factors in the management of fishing ports, namely the lack of service effectiveness in making ship certificates due to the time needed to manufacture shipwrecks, the lack of awareness and participation of the community in making ship letters is how important it is to have ship documents and these letters are very useful when carrying out fishing activities, which recently namely limited land and several unused buildings.

Conclusion. Based on the results of research on fishery port management in increasing local revenue at UPT.P2SKP Pasongsongan, the government has an important role, namely in the management of fishery ports such as revenue retribution, port operations, the availability of facilities and infrastructure. There are 2 factors in this influence the management of fishing ports, namely driving factors and inhibiting factors.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.508 pulau (besar dan kecil). Sekitar 65 persen wilayah nusantara terdiri dari perairan, maka dapat dikatakan Indonesia merupakan negara maritim. Karakteristik negara kepulauan dan negara maritim bahwa antara pulau-pulau terdapat perairan yang dapat digunakan sebagai alur transportasi laut. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 27 tentang Pemerintah daerah bahwa daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam laut yang di wilayahnya. Bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa kabupaten Sumenep itu mempunyai hak dalam mengelola sumberdaya alam lautnya baik dalam administrasinya dan penegakan hukumnya terhadap peraturan daerahnya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung proses pembangunan daerah. Melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah mampu membiayai berbagai pengeluaran yang dilakukan oleh daerah, yang pada dasarnya bertujuan untuk kemajuan daerah tersebut seperti dalam meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan semakin besar dengan didayagunakannya kewenangan pemerintah daerah. (Novrianti 2015)

Dengan adanya pelabuhan perikanan juga berperan serta merupakan titik temu antar transportasi laut. Di era pasar bebas pembangunan pelabuhan perikanan adalah salah satu cara untuk mencapai suatu keberhasilan dibidang dunia perikanan. Sedangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut butuh evaluasi kinerja atau operasionalnya. Seperti yang terdapat dalam tujuan dari Direktorat Jendral Perikanan Tangkap yaitu meningkatnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap berbasis pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan. Rendahnya/ketimpangan distribusi pendapatan nelayan sebagai masalah utama dari permasalahan yang dihadapi khususnya pada sektor perikanan tersebut, sesungguhnya bersumber pada masalah substansi yaitu adanya sekelompok anggota masyarakat (nelayan miskin) yang secara

struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat hidup yang layak. Akibatnya nelayan miskin tersebut harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan pemilikan aset usaha (produktif), sehingga semakin lama semakin tertinggal. Meskipun sesungguhnya hasil produksi tangkapan ikan nelayan di tiga desa studi relatif meningkat setiap tahunnya.(Tobarasi 2019)

Banyak kajian dan penelitian di lakukan oleh para peneliti Indonesia tentang pengelolaan pelabuhan perikanan salah satu diantaranya yang telah dilakukan oleh Muhammad Nur Taufik Siddik yang dipublikasikan pada No. ISSN 1979-5645 yang berjudul Retribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. dan dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan sudah baik tetapi belum optimal, dapat dilihat dari penerimaan retribusi tiap tahunnya terutama dalam 5 tahun terakhir yang meningkat tetapi kontribusi retribusi izin usaha kelautan dan perikanan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) cenderung stabil. Adapaun tata cara pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan antara lain meliputi pembuatan surat izin usaha kelautan dan perikanan, faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung.(Adisaputra, Pratama, and Nawawi 2014)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah PAD. Peningkatan PAD tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.(Susani, Ati, and Hayat 2019)

PAD dalam sektor kelautan di UPT.P2SKP meskipun tidak mencapai target yang sebanyak-banyaknya tapi lebih dari 60% setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2020 karena kondisi pandemi virus Covid 19 pendapatan asli daerah lumayan menurun, dan juga targetnya lumayan tinggi. Dari segi infrastruktur pelabuhan perikanan di desa pasongsongan seperti gedung TPI, kantor administrasi, gedung pertemuan nelayan, gedung pengepakan ikan, gapura alur keluar masuk pelabuhan, kantor poskamladu, gudang barang, dan kios nelayan. Melihat perkembangan infrastruktur pelabuhan perikanan di desa Pasongsongan yang sekarang sudah sangat berbeda. mayoritas mata pencariannya masyarakat di kecamatan pasongsongan yaitu sebagai nelayan. Dan melihat perbedaan dulu sebelum dikelolanya tempat pengelolaan ikan di pasongsongan yang sekarang lebih efisien dan efektif.

2. MATERIAL DAN METODE

Pendekatan yang digunakan pada ini adalah pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang dipilih untuk digunakan dalam rangka memperoleh suatu data yang akurat dan relevan, sehingga dapat di analisis serta dapat disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian tersebut. Jenis data yang dikumpulkan bersifat naturalistik atau alamiah apa adanya. Dalam penelitian bimbingan konseling, pengumpulan data akan berupa membuat rekaman atau catatan komprehensif tentang kata-kata atau ucapan dan tindakan atau tingkah laku partisipan (Willig, 2008).

Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Lokasi penelitian yaitu di UPT.Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasongsongan (UPT.P2SKP). Penulis memilih menggunakan pendekatan kualitatif agar

dapat mengetahui dan mendeskripsikan kenyataan dari fenomena yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui pengelolaan pelabuhan perikanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di pelabuhan perikanan UPT.P2SKP Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Tabel.1 Sumber data primer

Asal Responden	Jumlah	Teknik Pengambilan Data	Keterangan
UPT.P2SKP Pasongsongan	5	Wawancara	Subjek
Pedagang ikan Pasongsongan	10	Wawancara	Informan (Pedagang)
Nelayan	10	Wawancara	Informan (Nelayan)
Masyarakat Pasongsongan	10	Wawancara	Informan (Masyarakat)

Penelitian mengambil sumber data dari asal responden yaitu 5 dari aparaturn pemerintah di UPT. P2SKP Pasongsongan salah satunya kepala pelabuhan perikanan dan stafnya. 10 dari pedagang ikan, 10 dari informan nelayan, dan 10 dari masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif tentang pengelolaan pelabuhan perikanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada UPT.Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT.P2SKP) Pasongsongan Kabupaten Sumenep, sehingga peneliti kemudian mencari data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Disini peneliti membahas tentang peran pemerintah dalam pengelolaan pelabuhan perikanan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di UPT.P2SKP Pasongsongan. Pengelolaan yang dimaksud pada penelitian ini adalah tentang bagaimana mengelola pelabuhan dalam artian yang pertama melaksanakan dan melakukan pelaksanaan dari retribusi sektor kelautan dan perikanan di UPT.P2SKP Pasongsongan Kabupaten Sumenep, adapun dalam pembahasan masalah tentang bagaimana pelaksanaan dan pengawasan dari retribusi dapat di lihat dari apa saja yang sudah dilakukan oleh UPT.P2SKP Pasongsongan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan potensi dan peraturan yang sudah ditetapkan. Peran dari Kantor UPT.Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT.P2SKP) Pasongsongan Kabupaten Sumenep ialah membuat target pendapatan terlebih dahulu sesuai dengan potensi dan peraturan yang telah ditetapkan, dari hasil perencanaan target kemudian disosialisasikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan serta diserahkan kepada DPRD untuk dirapatkan dan disepakati. Kemudian dari hasil rapat tersebut biasanya yang terjadi perubahan target pendapatan yang telah dibuat oleh UPT.Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT.P2SKP) Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Tabel.2 Relaisasi Penerimaan PAD UPT.P2SKP Pasongsongan

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI PENERIMAAN	PAD DARI HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE TERCAPAI
1.	2017	100.000.00 0	72.969.000	72.969.000	72%
2.	2018	175.000.00 0	128.022.000	128.022.000	73%
3.	2019	175.000.00 0	111.920.500	111.920.500	63%
4.	2020	217.000.00 0	137.205.408	137.205.408	632,%

Sumber data : Kantor UPT.Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT.P2SKP) Pasongsongan

Melihat tabel diatas bahwa target dan realisasi penerimaan hasil retribusi sektor kelautan dan perikanan bisa dikatakan hampir mencapai target pada tahun 2017, target mencapai 100.000.000 dan realisasi penerimaan 72.969.00, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan yang sangat besar baik pada target tetapi mengalami penurunan pada realisasi penerimaannya, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan baik dari target maupun realisasi penerimaannya. Hal yang mempengaruhi target perencanaan maupun realisasi penerimaan biasa pada aturan yang mengatur ataupun perencanaan program yang belum maksimal. Perencanaan harus melihat dari berbagai aspek contohnya sumberdaya, sarana, dan prasarana. Adapaun perencanaan dari pemerintah Kabupaten Sumenep terkhusus di kantor UPT.Pelabuhan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT.P2SKP) Pasongsongan dengan melihat dari peraturan daerah ialah pembuatan surat izin penangkapan ikan (SIPI), surat izin kapal pengangkutan ikan , surat izin usaha penangkapan dan pengangkutan ikan (SIUP).

Kesadaran masyarakat akan surat izin usaha perikanan itu sangat penting, sehingga perencanaan yang dibuat oleh dinas kelautan dan perikanan berdasarkan pada peraturan daerah yang telah ditetapkan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Begitu juga yang dijelaskan kepala pelabuhan bahwa dalam pembuatan surat izin ada berapa prosedur administrasi yang harus di penuhi oleh pemohon yang kan membuat surat izin usaha, mungkin dari beberapa prosedur administrasi tersebut masyarakat merasa ribet dan susah mengurus surat izin tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT.Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT.P2SKP) Pasongsongan (Choirul Huda, 2021):

“Pada perencanaan penentuan target anggaran retribusi sektor kelautan dan perikanan, terdapat langkah berupa seksi izin usaha kelautan dan perikanan bersama Kepala Pelabuhan mengajukan usulan kepada Dinas Perikanan dan kelautan kemudian Dinas mengajukan usulan target anggaran kepada DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah), kemudian usulan tersebut diserahkan ke DPRD Kabupaten Sumenep, Setelah mendapat kesepakatan berulah target yang telah disetujui dapat terealisasikan”.

Selain dari retribusi pembuatan surat kapal melainkan juga dari hasil retribusi pas masuk pelabuhan. Retribusi Boarding Pass Pelabuhan adalah pungutan atau penarikan tarif yang dilakukan oleh pelabuhan sebagai pembayaran jasa yang diberikan oleh pemerintah

bagi penduduk secara perorangan, dimana dikenakan sesuai tarif yang telah ditentukan oleh daerah tersebut atau daerah yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh daerah itu sendiri. Biasanya yang menjadi objek dari retribusi pas masuk pelabuhan ini yaitu orang pribadi dan kendaraan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Pasal 1 ayat 40 tentang Retribusi jasa pelabuhan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemabayaran atas pelayanan penyediaan dermaga fasilitas tempat bertambatnya kapal, tempat turun dan naiknya penumpang dan kendaraan, serta bongkar muat, kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 3. Hasil retribusi tahun 2019

NO	BULAN	SETOR PAD KE KASDA
1.	Januari	4.961.500
2.	Februari	1.548.500
3.	Maret	1.009.500
4.	April	613.000
5.	Mei	898.500
6.	Juni	929.000
7..	Juli	2.780.000
8.	Agustus	412.000
9.	September	2.623.500
10.	Oktober	181.500
11.	November	1.703.000
12.	Desember	230.000

Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep

Tabel 4. Hasil Retribusi Tahun 2020

NO	BULAN	SETOR PAD KE KASDA
1.	Januari	1.260.500
2.	Februari	3.134.500
3.	Maret	8.717.250
4.	April	2.523.750
5.	Mei	804.500
6.	Juni	2.957.000
7..	Juli	9.125.000
8.	Agustus	4.185.000

Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep

Dari tabel di atas hasil retribusi tahun 2019-2020 tidak hanya dari pemugutan pas masuk kendaraan baik modil atau sepeda motor, melainkan dari hasil pemungutan pemakaian los jaring, pemakaian air, doking kapal, listrik, pas masuk orang, sewa lahan lerep, jasa kebersihan.

Yang kedua peran pemerintah dalam pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu operasional pelabuhan, kegiatan operasional pelabuhan yang di lakukan ole UPT.Pelabuhan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (UPT.P2SKP) Pasongsongan sebagai berikut: pendaratan ikan, dan pelayanan jasa perbekalan kapal. Proses pendaratan ikan di UPT.P2SKP Pasongsongan berlangsung dari pagi hari mulai pukul 06.00 WIB sampai selesai

tidak ada batas waktu yang ditentukan. Orang yang membantu dari proses pendaratan ikan kapal ini dari anak buah kapal (ABK) yang sekitaran 16-20 orang dan juga ada kuli pikul/angkut per grup 16 orang. Sebelum hasil tangkapan di daratkan di atas kapal disortir terlebih dahulu sesuai jenis dan ukuran oleh anak buah kapal dikarenakan jenis dan ukuran akan mempengaruhi harga jual sehingga setelah kapal sampai di dermaga hasil tangkapan ikan siap di daratkan.

Tabel 5. Jumlah Produksi Ikan Tahun 2017-2020

No	Jenis Ikan	Jumlah Per Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Manyung	2262	8667	6544	11285
2	Layang	1386002	2279661	1865841	1840935
3	Kembung	99891	32282	76824	104282
4	Selar Kuning	42236	9620	4238	19591
5	Bentong	53001	34047	33364	61492
6	Kakap Merah	2479	1932	2163	1395
7	Tembang	94119	212123	460711	423647
8	Tongkol	204040	144923	371470	525064
9	Tenggiri	26166	10249	7325	8891
10	Layur	69564	26013	56213	36680
11	Semar	54041	68145	31057	1929
12	Pari	2041	780	1091	7362
13	Sunglir	4823	1196	1391	17433
14	Cumi-cumi	19887	9209	12951	761
15	Remang	856	274	531	3773
16	Lemadang	2175	307	770	7859
17	Alu-alu	11991	5959	7947	19318
18	Tatengkek	10987	13221	9113	29740
18	Bawal Hitam	57685	23498	24160	3081
20	Cucut Martil	228	10	15	156
21	Hiu	12	10218	4162	6050
22	Daun Bambu	6396	460	221	348
23	Golok-golok	1681	3132	5913	3912
24	Kwee	9250	2821	5913	78
25	Terubuk	3328	390	-	221
26	Layaran	0	15443	915	68
27	Peperek	9993	1924	22705	245
28	Talang-talang	0	39	-	130
29	Swanggi	10462	180	85	-
30	Odul	385	2650	90	-
31	Pari Kekeh	3967	2919373	3398	4266
32	Jaket	10088	-	-	-

Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep

Menurut laporan tahunan UPT.P2SKP Pasongsongan Tahun 2020, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah hasil tangkapan ikan yaitu salah satunya musim ikan. Musim ikan ini yang sangat mempengaruhi jumlah produksi ikan di perairan pasongsongan. Jumlah trip yang dilakukan nelayan pada saat puncak musim tertinggi dan puncak musim terendah juga memiliki perbedaan. Kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya di UPT.P2SKP Pasongsongan rata-rata sebanyak 18 kapal dengan rata-rata hasil tangkapan sebanyak 3,3 ton per hari, sedangkan pada musim terendah sebanyak 7 kapal dengan hasil rata-rata sebanyak 1,5 ton perhari.

Tabel 6. Jumlah Trip Nelayan

No	Bulan	2-10 GT	10-20 GT	>20 GT	Jumlah
1.	Januari	-	250	-	250
2.	Februari	125	196	-	321
3.	Maret	205	478	-	683
4.	April	196	395	-	591
5.	Mei	65	141	-	206
6.	Juni	40	45	-	85
7.	Juli	75	152	-	227
8.	Agustus	250	344	-	594
9.	September	156	344	-	500
10.	Oktober	136	300	-	436
11.	November	172	319	-	491
12.	Desember	87	64	-	151
	Total	1507	3028	0	4535

Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep

Selain pendaratan ikan dalam operasional pelabuhan perikanan yaitu jasa perbekalan yang dimaksud pelayanan perbekalan yaitu dimana sebelum nelayan berangkat mencari ikan atau melakukan kegiatan penangkapan di laut lepas UPT.P2SKP Pasongsongan menyiapkan perbekalan yang akan digunakan saat melaut yaitu berupa es, air, solar dan bahan makanan bagi nahkoda dan anak buah kapal (ABK). Tetapi di UPT.P2SKP Pasongsongan hanya menyediakan air saja untuk perbekalan melaut, dikarenakan UPT.P2SKP Pasongsongan masih belum memiliki fasilitas pabrik es di sekitar UPT.P2SKP Pasongsongan, sedangkan solar yang diperoleh nelayan dari SPBU Pasongsongan. UPT.P2SKP Pasongsongan hanya menyediakan pasokan air bersih dari tandon yang ada di pelabuhan. Ketersediaan air bersih di pelabuhan perikanan pasongsongan berasal dari air sumur yang ada di UPT.P2SKP Pasongsongan.

Tabel 7. Perbekalan es, solar, dan air tahun 2020

No	Bulan	Es (kg)	Solar (liter)	Air (liter)
1.	Januari	54.600	60.000	62.500
2.	Februari	30.800	47.070	49.000
3.	Maret	72.100	114.720	119.500
4.	April	49.000	94.800	98.750
5.	Mei	16.800	33.840	35.250
6.	Juni	2.450	10.800	11.250
7.	Juli	33.250	36.480	38.000
8.	Agustus	177.100	82.560	86.000

No	Bulan	Es (kg)	Solar (liter)	Air (liter)
9.	September	214.200	82.560	86.000
10.	Oktober	66.408	84.282	69.850
11.	November	47.799	69.000	70.800
12.	Desember	2.450	15.360	16.000
	Total	766.957	731.442	742.900

Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep

Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah di UPT.P2SKP Pasongsongan. Sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan perikanan umumnya terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Menurut Profil UPT.P2SKP Pasongsongan 2020, UPT.P2SKP Pasongsongan sudah memiliki fasilitas-fasilitas tersebut.

Tabel 8. Fasilitas Pokok dan Kondisi Fasilitas di UPT.P2SKP Pasongsongan

No	Fasilitas	Satuan	Kondisi
1.	Lahan Pelabuhan	2 Ha	Baik
2.	Dermaga	210m ²	Baik
3.	Kolam Pelabuhan	1,4 Ha	Baik
4.	Jalan Komplek	887 m	Baik
5.	Break Water	170 m	Baik
	- Sisi Barat		
	- Sisi Timur	200 m	Baik

Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep

Tabel 9. Fasilitas Fungsional dan Kondisi Fasilitas di UPT.P2SKP Pasongsongan

No	Fasilitas	Satuan	Kondisi
1.	Gedung TPI	333 m ²	Baik
2.	Kantor Administrasi	120 m ²	Baik
3.	Tangki Air	12 m ²	Baik
4.	Direksikeet	80 m ²	Baik
5.	Gedung Pengepakan Ikan	252.96 m ²	Baik
6.	Bengkel	100 m ²	Baik
7.	Los Jaring	457.96 m ²	Baik
8.	Docking Kapal	990 m ²	Baik
9.	Poskamladu	150 m ²	Baik

Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep

Tabel 10. Fasilitas Penunjang dan Kondisi Fasilitas di UPT.P2SKP Pasongsongan

No	Fasilitas	Satuan	Kondisi
1.	Rumah Dinas	4 Unit	Baik
2.	Gedung Serbaguna	231 m ²	Baik
3.	Kios Ikan	10 Unit	Baik
4.	Kios Nelayan	17 Unit	Baik

Sumber: UPT.P2SKP Pasongsongan Kab.Sumenep

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti mengemukakan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pelabuhan perikanan di UPT.P2SKP Pasongsongan yaitu faktor penunjang dan faktor penghambat. Dari hasil wawancara peneliti serta melihat langsung kondisi di lapangan ada beberapa faktor yang menunjang pengelolaan pelabuhan perikanan tersebut yaitu yang pertama sumberdaya masih kurang pada UPT.P2SKP Pasongsongan akan tetapi pihak UPT.P2SKP Pasongsongan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan sebaik mungkin sehingga sampai saat ini kegiatan atau program yang ada di pelabuhan perikanan berjalan dengan lancar. Kedua struktur birokrasi menetapkan struktur apa saja yang ditetapkan dan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kinerja organisasi, dan penempatan orangpun sudah sesuai dengan bidang dan keahliannya. Ketiga yaitu komunikasi, komunikasi antara aparat pemerintah di UPT.P2SKP Pasongsongan dengan masyarakat nelayan berjalan dengan baik. Dari situ pengimplementasian kebijakan yang ada di pelabuhan perikanan pasongsongan akan berhasil. Dengan diadakannya sosialisasi oleh pemerintah bisa mengetahui apa saja kebijakan atau aturan-aturan yang ada di pelabuhan perikanan serta agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah di UPT.P2SKP Pasongsongan dengan masyarakat nelayan. Keempat yaitu aturan atau regulasi, aturan pemungutan retribusi harus jelas, serta melihat sesuai kondisi yang ada dilapangan. Apabila suatu daerah mengelola potensi daerahnya tersebut dengan aturan yang baik dan benar maka hasilnya akan maksimal. Dengan adanya aturan yang jelas maka akan terjadi kesinambungan antara potensi yang dimiliki di daerah tersebut dengan hasil yang di dapatkan.

Faktor penghambat dalam pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu yang pertama kurangnya efektifitas pelayanan, di UPT.P2SKP Pasongsongan masih bisa dibilang kurang efektif, karena lamanya waktu atau proses pembuatan surat atau dokumen kapal membutuhkan waktu yang lumayan lama.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat nelayan (musleh, 2021) mengatakan bahwa :

“Untuk mengurus surat-surat perahu saya tidak terlalu memperhatikan, bukan karena saya tidak paham untuk mengurus surat-surat tersebut dikarekan waktu dala pembuatannya memakan waktu yang cukup lama”.

Kurangnya tenaga kerja atau sumberdaya menjadikan pekerjaan atau tugas tidak efektif dan efisien. Jadi pelayanan dalam pembuatan surat-surat kapal itu membutuhkan waktu lumayan lama, tidak bisa sehari atau dua hari selesai, karena juga prosesnya tidak hanya di kantor UPT.P2SKP Pasongsongan melainkan juga mengurus ke Dinas Perikanan Jn di Kabupaten Sumenep. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi dalam pembuatan surat-surat kapal, tingkat kesadaran dan partisipasinya dalam melihat kewajibannya untuk membuat surat-surat kapal masi kurang baik dikarenakan mereka menganggap remeh dan tidak penting membuat surat-surat kapal yang seharusnya mereka punya untuk kapal mereka.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat nelayan (Samat, 2021) mengatakan bahwa :

“Kalau saya kurang paham dalam proses pembuatan surat kapal, saya kadang masih bingung untuk persyaratan-persyaratannya meskipun ikut sosialisasi dari pelabuhan”.

Yang ketiga yaitu terbatasnya luas lahan di UPT.P2SKP Pasongsongan menyulitkan pihak UPT.P2SKP Pasongsongan untuk melakukan pengembangan pelabuhan ke depannya dan berpengaruh juga dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sistem pemasaran di UPT.P2SKP Pasongsongan tidak melalui mekanisme pasar yang menguntungkan bagi

nelayan maupun bagi pedagang karena tidak adanya mekanisme kegiatan pelelangan ikan padahal sudah disediakan gedung pelelangan ikan akan tetapi masyarakat tidak menghiraukan itu sehingga harga jual hasil tangkapan ikan tidak stabil dan juga dapat mempengaruhi peningkatan PAD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Choirul Huda selaku kepala pelabuhan di UPT.P2SKP Pasongsongan (17-02-2021) mengatakan bahwa :

“Lahan bebas yang belum dipergunakan hanya tinggal sedikit, tetapi untuk sekarang sudah mulai memperluas lahan lagi dan rencananya lahan kosong tersebut mau di jadikan bebrapa gedung operasional pelabuhan sekaligus tempat wisata, berhubung ini dekat dengan laut cocok sekali untuk dijadikan tempat wisata, akan tetapi berhubung sekarang lagi pandemi covid jadi PAD yang turun dari pemerintah juga menurun, jadi sekarang harus diberhitajn dulu proses pembangunannya ya di karenakan dana masi kurang”.

4. KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di UPT.P2SKP Pasongsongan dalam hal ini yang dilaksanakan UPT.P2SKP Pasongsongan sudah dibilang cukup berhasil. Karena peran pemerintah dalam peneglolaan pelabuhan perikanan di UPT.P2SKP Pasongsongan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dengan pengelolaan retribusi pendapatan daerah, operasional pelabuhan perikanan, sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan. Pelaksanakan pengelolaan retribusi pendapatan daerah meliputi retribusi surat-surat kapal di pelabuhan sesuai dengan peraturan daerah dan hasil retribusi pas masuk pelabuhan. Sedangkan dalam pelaksanaan operasional di UPT.P2SKP Pasongsongan meliputi pendaratan ikan dan perbekalan. Adapaun sarana dan prasarana yang ada di UPT.P2SKP Pasongsongan memiliki 3 fasilitas yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Faktor pendukung dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di UPT.P2SKP Pasongsongan yaitu sumberdaya, struktur birokrasi, komunikasi, aturan atau regulasi. Faktor penghambat dalam pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu kurangnya efektifitas pelayanan, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang pembuatan surat kapal, terbatasnya lahan dan beberapa gedung yang tidak dipergunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, Wismoyo, Nuradyatun Pratama, and Juanda Nawawi. 2014. “Pengelolaan Retribusi Sektor Kelautan Dan Perikanan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Majene.” 7: 121–28.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. Pembangunan Ekonomi Maritim. Yogyakarta: Graha Ilmu. <http://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=37399>.
- Hayat. 2014. “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur Pelayanan Publik Dalam Kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.” 8(1). <https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/70/110>.
- Hayat. 2016. “Peneguhan Reformasi Melalui Penilaian Kinerja Pelayanan Publik.” 20(2). <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/24804/16032>.
- Hayat. 2020. “Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Pelayanan Publik.” 8(1). <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/HH/1190>.
- Hayat. 2018. “Kebijakan Publik.” In Malang: Intrans Publishing. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik.

- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Depok: PT.RajaGrafindo Persada.
<http://www.rajagrafindo.co.id/produk/manajemen-pelayanan-publik-2/>.
- Novrianti, Ade. 2015. "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Sektor Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tolitoli." *Katalogis* 3(8): 176–87.
- Sri Soemantri Martosoewignjo. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=910649>.
- Susani, Novira, Nurul Umi Ati, and Hayat. 2019. "Pengembangan Objek Wisata Taman Nasional Kelimutu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende." *Jurnal Respon Publik* 13(3): 103–12.
- Tobarasi, Indrawan. 2019. "Analisis Alternatif Kebijakan Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Konawe." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 5(2): 29–40.
- Wahyono Suroto Kusumoprojo. 2009. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta Selatan: Teraju Anggota IKAPI.
https://www.google.co.id/books/edition/Indonesia_negara_maritim/QoJKR85srh8C?hl=id&gbpv=0.